



GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

NOMOR 093 TAHUN 2022

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN
NOMOR 048 TAHUN 2022 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

- Menimbang:**
- a. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 048 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Daerah sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini dan perlu diubah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 048 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- Mengingat:**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lemabran Negarta Republik Indonesia Nomor 6264);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
20. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Perajalan Dinas Ke Luar Negeri Bagi Pejabat/Pegawai di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pimpinan serta Anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan Pimpinan serta Anggota Dewa Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 60);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 342) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 51);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
25. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 100);
26. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 Nomor 13);
27. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 092 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 92) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 071 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 092 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018 Nomor 71);
28. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 095 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019 Nomor 95) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 010 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 095 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN NOMOR 048 TAHUN 2022 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 048 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 Nomor 48), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:
 - a. satuan biaya honorarium;
 - b. satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri;
 - c. satuan biaya rapat/pertemuan di dalam dan di luar kantor;
 - d. satuan biaya pengadaan kendaraan dinas;
 - e. satuan biaya konsumsi rapat;
 - f. satuan biaya pemeliharaan;
 - g. satuan biaya sewa kendaraan dan peralatan untuk keperluan dinas;
 - h. satuan biaya pengadaan pakaian dinas; dan
 - i. satuan biaya bahan bakar minyak.
- (2) Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan prinsip efisien, efektivitas, kepatutan, dan kewajaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) Ketentuan mengenai besaran biaya Standar Harga Satuan diatur dalam Keputusan Gubernur.

2. Diantara Pasal 5 dan 6 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 5A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5A

- (1) Pemberian honorarium bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dilakukan sesuai dengan tingkat kewajaran dan kondisi kerja.
- (2) Pemberian honorarium untuk Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/Lapangan melalui Perjanjian Kerja/Perikatan dapat diberikan sesuai dengan kondisi riil peran dan kontribusi, serta terkait langsung dengan kelancaran pelaksanaan kegiatan di masing-masing satuan kerja perangkat daerah.

3. Ketentuan Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 048 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Daerah diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 29 Desember 2022

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

SAHBIRIN NOOR

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 29 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

ROY RIZALI ANWAR

**BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 2022 NOMOR**

LAMPIRAN I
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR
KALIMANTAN SELATAN NOMOR 048
TAHUN 2022 TENTANG STANDAR HARGA
SATUAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

STANDAR HARGA SATUAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

Ketentuan dalam Lampiran I dalam Peraturan Gubernur ini mengatur mengenai batas tertinggi yang tidak boleh dilampaui, baik dalam perencanaan anggaran maupun pelaksanaan anggaran, yang terdiri dari:

1. satuan biaya honorarium;
2. satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri;
3. satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor; dan
4. satuan biaya pengadaan kendaraan dinas.

Standar harga satuan di lingkungan pemerintah daerah yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini merupakan harga satuan barang dan jasa yang ditetapkan dengan mempertimbangkan tingkat kemahalan di daerah.

1. SATUAN BIAYA HONORARIUM

Satuan biaya honorarium yang diberikan berdasarkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi:

1.1. Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan

Honorarium diberikan kepada :

- 1.1.1. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
- 1.1.2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
- 1.1.3. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD);
- 1.1.4. Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan; dan
- 1.1.5. Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu.
- 1.1.6. Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan pada Perangkat Daerah (PPK-PD) dan/atau UPTD terdiri atas Staff Pengelola Keuangan antara lain :
 - a. Petugas Pembuat SPP/SPM;
 - b. Petugas Verifikasi SPJ.
 - c. Petugas Akuntansi dan Pelaporan Pengeluaran dan Penerimaan.
 - d. Petugas Pembuat daftar gaji; dan
 - e. Petugas Pembuat Dokumen.

25	SULAWESI UTARA	Unit	Rp33.157.000,00	Rp36.670.000,00
26	GORONTALO	Unit	Rp31.161.000,00	Rp37.750.000,00
27	SULAWESI BARAT	Unit	Rp30.767.000,00	Rp35.503.000,00
28	SULAWESI SELATAN	Unit	Rp30.767.000,00	Rp33.892.000,00
29	SULAWESI TENGAH	Unit	Rp34.310.000,00	Rp37.750.000,00
30	SULAWESI TENGGARA	Unit	Rp34.438.000,00	Rp38.184.000,00
31	MALUKU	Unit	Rp32.478.000,00	Rp38.830.000,00
32	MALUKU UTARA	Unit	Rp34.184.000,00	Rp38.830.000,00
33	PAPUA	Unit	Rp32.224.000,00	Rp42.070.000,00
34	PAPUA BARAT	Unit	Rp35.485.000,00	Rp40.891.000,00

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

SAHBIRIN NOOR

LAMPIRAN II
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR
KALIMANTAN SELATAN NOMOR 048 TAHUN
2022 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

STANDAR HARGA SATUAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini mengatur mengenai satuan harga yang berfungsi sebagai batas tertinggi yang tidak dapat dilampaui dalam perencanaan anggaran dan satuan biaya yang berfungsi sebagai estimasi yang merupakan batasan nilai yang dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran berdasarkan dengan didasarkan atas bukti pertanggung jawaban yang terdiri atas:

1. Satuan biaya honorarium narasumber, moderator, dan pembawa acara professional;
2. Satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri;
3. Satuan biaya konsumsi rapat; dan
4. Satuan biaya pemeliharaan;
5. Satuan biaya sewa kendaraan dan peralatan untuk keperluan dinas;
6. Satuan biaya pengadaan pakaian dinas; dan
7. Satuan biaya bahan bakar minyak.

1. **HONORARIUM NARASUMBER, MODERATOR, ATAU PEMBAWA ACARA PROFESIONAL**

Pemberian honorarium jasa narasumber, moderator, atau pembawa acara profesional (pakar, praktisi, atau pembawa khusus) yang mempunyai keahlian dan/atau pengalaman tertentu dalam ilmu dan/atau bidang tertentu untuk kegiatan seminar, rapat koordinasi, sosialisasi, diseminasi, dan kegiatan sejenisnya dilaksanakan sesuai satuan biaya honorarium sebagaimana terinci pada Tabel 2.1.

TABEL 2.1
HONORARIUM NARASUMBER, MODERATOR, ATAU
PEMBAWA ACARA PROFESIONAL

NO	URAIAN	SATUAN	BESARA
1.1	Honorarium Narasumber	OJ	Rp1.700.000,00
1.2	Honorarium Moderator	OK	Rp1.000.000,00
1.3	Honorarium Pembawa Acara	OK	Rp750.000,00

Pemberian honorarium jasa narasumber, moderator, atau pembawa acara profesional (pakar, praktisi, atau pembicara khusus) dapat melebihi besaran standar honor narasumber, moderator, atau pembawa acara sebagaimana diatur dalam Tabel 2.1. sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*).

2. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

2.1 SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI PERGI PULANG (PP)

Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri adalah satuan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara pergi pulang (PP) dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan, yang digunakan dalam perencanaan anggaran. Besaran satuan biaya tiket terinci pada Tabel 2.2.

TABEL 2.2
SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI
PERGI PULANG (PP)

No	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	JAKARTA	AMBON	Rp13.285.000	Rp7.081.000
2	JAKARTA	BALIKPAPAN	Rp7.412.000	Rp3.797.000
3	JAKARTA	BANDA ACEH	Rp7.519.000	Rp4.492.000
4	JAKARTA	BANDAR LAMPUNG	Rp2.407.000	Rp1.583.000
5	JAKARTA	BANJARMASIN	Rp5.252.000	Rp2.995.000
6	JAKARTA	BATAM	Rp4.867.000	Rp2.888.000
7	JAKARTA	BENGKULU	Rp4.364.000	Rp2.621.000
8	JAKARTA	BIAK	Rp14.065.000	Rp7.519.000
9	JAKARTA	DENPASAR	Rp5.305.000	Rp3.262.000
10	JAKARTA	GORONTALO	Rp7.231.000	Rp4.824.000
11	JAKARTA	JAMBI	Rp4.065.000	Rp2.460.000
12	JAKARTA	JAYAPURA	Rp14.568.000	Rp8.193.000
13	JAKARTA	YOGYAKARTA	Rp4.107.000	Rp2.268.000
14	JAKARTA	KENDARI	Rp7.658.000	Rp4.182.000
15	JAKARTA	KUPANG	Rp9.413.000	Rp5.081.000
16	JAKARTA	MAKASSAR	Rp7.444.000	Rp3.829.000
17	JAKARTA	MALANG	Rp4.599.000	Rp2.695.000
18	JAKARTA	MAMUJU	Rp7.295.000	Rp4.867.000
19	JAKARTA	MANADO	Rp10.824.000	Rp5.102.000
20	JAKARTA	MANOKWARI	Rp16.226.000	Rp10.824.000
21	JAKARTA	MATARAM	Rp5.316.000	Rp3.230.000
22	JAKARTA	MEDAN	Rp7.525.000	Rp3.808.000
23	JAKARTA	PADANG	Rp5.530.000	Rp2.952.000
24	JAKARTA	PALANGKARAYA	Rp4.984.000	Rp2.984.000
25	JAKARTA	PALEMBANG	Rp3.861.000	Rp2.268.000
26	JAKARTA	PALU	Rp9.348.000	Rp5.113.000
27	JAKARTA	PANGKAL PINANG	Rp3.412.000	Rp2.139.000
28	JAKARTA	PEKANBARU	Rp5.583.000	Rp3.016.000
29	JAKARTA	PONTIANAK	Rp4.353.000	Rp2.781.000
30	JAKARTA	SEMARANG	Rp3.861.000	Rp2.182.000
31	JAKARTA	SOLO	Rp3.861.000	Rp2.342.000
32	JAKARTA	SURABAYA	Rp5.466.000	Rp2.674.000
33	JAKARTA	TERNATE	Rp10.001.000	Rp6.640.000
34	JAKARTA	TIMIKA	Rp13.830.000	Rp7.487.000
35	AMBON	DENPASAR	Rp8.054.000	Rp4.471.000
36	AMBON	JAYAPURA	Rp7.434.000	Rp4.161.000
37	AMBON	KENDARI	Rp4.824.000	Rp2.856.000
38	AMBON	MAKASSAR	Rp6.022.000	Rp3.455.000
39	AMBON	MANOKWARI	Rp5.177.000	Rp3.027.000

40	AMBON	PALU	Rp6.140.000	Rp3.508.000
41	AMBON	SORONG	Rp3.637.000	Rp2.257.000
42	AMBON	SURABAYA	Rp8.803.000	Rp4.845.000
43	BALIKPAPAN	TERNATE	Rp4.022.000	Rp2.449.000
44	BALIKPAPAN	BANDA ACEH	Rp12.739.000	Rp6.749.000
45	BALIKPAPAN	BATAM	Rp10.354.000	Rp5.305.000
46	BALIKPAPAN	DENPASAR	Rp10.739.000	Rp5.648.000
47	BALIKPAPAN	JAYAPURA	Rp19.071.000	Rp10.086.000
48	BALIKPAPAN	YOGYAKARTA	Rp9.669.000	Rp4.749.000
49	BALIKPAPAN	MAKASSAR	Rp12.664.000	Rp6.150.000
50	BALIKPAPAN	MANADO	Rp15.702.000	Rp7.295.000
51	BALIKPAPAN	MEDAN	Rp12.493.000	Rp6.140.000
52	BALIKPAPAN	PADANG	Rp10.942.000	Rp5.369.000
53	BALIKPAPAN	PALEMBANG	Rp9.445.000	Rp4.749.000
54	BALIKPAPAN	PEKANBARU	Rp10.996.000	Rp5.423.000
55	BALIKPAPAN	SEMARANG	Rp9.445.000	Rp4.674.000
56	BALIKPAPAN	SOLO	Rp9.445.000	Rp4.813.000
57	BALIKPAPAN	SURABAYA	Rp10.889.000	Rp5.113.000
58	BALIKPAPAN	TIMIKA	Rp18.408.000	Rp9.445.000
59	BANDA ACEH	DENPASAR	Rp10.835.000	Rp6.279.000
60	BANDA ACEH	JAYAPURA	Rp19.167.000	Rp10.717.000
61	BANDA ACEH	YOGYAKARTA	Rp9.765.000	Rp5.380.000
62	BANDA ACEH	MAKASSAR	Rp12.760.000	Rp6.781.000
63	BANDA ACEH	MANADO	Rp15.798.000	Rp7.926.000
64	BANDA ACEH	PONTIANAK	Rp9.990.000	Rp5.840.000
65	BANDA ACEH	SEMARANG	Rp9.530.000	Rp5.305.000
66	BANDA ACEH	SOLO	Rp9.530.000	Rp5.444.000
67	BANDA ACEH	SURABAYA	Rp10.985.000	Rp5.744.000
68	BANDA ACEH	TIMIKA	Rp18.504.000	Rp10.076.000
69	BANDAR LAMPUNG	BALIKPAPAN	Rp8.129.000	Rp4.129.000
70	BANDAR LAMPUNG	BANDA ACEH	Rp9.225.000	Rp4.760.000
71	BANDAR LAMPUNG	BANJARMASIN	Rp6.193.000	Rp3.412.000
72	BANDAR LAMPUNG	BATAM	Rp5.840.000	Rp3.316.000
73	BANDAR LAMPUNG	BIAK	Rp14.119.000	Rp7.487.000
74	BANDAR LAMPUNG	DENPASAR	Rp6.236.000	Rp3.647.000
75	BANDAR LAMPUNG	JAYAPURA	Rp14.568.000	Rp8.097.000
76	BANDAR LAMPUNG	YOGYAKARTA	Rp5.155.000	Rp2.760.000
77	BANDAR LAMPUNG	KENDARI	Rp8.354.000	Rp4.482.000
78	BANDAR LAMPUNG	MAKASSAR	Rp8.161.000	Rp4.161.000
79	BANDAR LAMPUNG	MALANG	Rp5.594.000	Rp3.134.000
80	BANDAR LAMPUNG	MANADO	Rp11.190.000	Rp5.305.000
81	BANDAR LAMPUNG	MATARAM	Rp6.246.000	Rp3.626.000
82	BANDAR LAMPUNG	MEDAN	Rp7.979.000	Rp4.150.000
83	BANDAR LAMPUNG	PADANG	Rp6.439.000	Rp3.380.000
84	BANDAR LAMPUNG	PALANGKARAYA	Rp5.947.000	Rp3.401.000
85	BANDAR LAMPUNG	PALEMBANG	Rp4.931.000	Rp2.760.000
86	BANDAR LAMPUNG	PEKANBARU	Rp6.482.000	Rp3.433.000
87	BANDAR LAMPUNG	PONTIANAK	Rp5.380.000	Rp3.220.000
88	BANDAR LAMPUNG	SEMARANG	Rp4.931.000	Rp2.685.000
89	BANDAR LAMPUNG	SOLO	Rp4.931.000	Rp2.824.000
90	BANDAR LAMPUNG	SURABAYA	Rp6.386.000	Rp3.123.000
91	BANDAR LAMPUNG	TIMIKA	Rp13.905.000	Rp7.455.000
92	BANDUNG	BATAM	Rp6.289.000	Rp3.583.000
93	BANDUNG	DENPASAR	Rp5.626.000	Rp3.252.000
94	BANDUNG	JAKARTA	Rp2.064.000	Rp1.476.000
95	BANDUNG	JAMBI	Rp5.006.000	Rp2.941.000
96	BANDUNG	YOGYAKARTA	Rp3.369.000	Rp2.129.000
97	BANDUNG	PADANG	Rp6.129.000	Rp3.508.000

98	BANDUNG	PALEMBANG	Rp4.385.000	Rp2.631.000
99	BANDUNG	PANGKAL PINANG	Rp4.599.000	Rp2.738.000
100	BANDUNG	PEKANBARU	Rp6.525.000	Rp3.701.000
101	BANDUNG	SEMARANG	Rp3.027.000	Rp1.967.000
102	BANDUNG	SOLO	Rp3.647.000	Rp2.268.000
103	BANDUNG	SURABAYA	Rp4.824.000	Rp2.856.000
104	BANDUNG	TANJUNG PANDA	Rp4.439.000	Rp2.663.000
105	BANJARMASIN	BANDA ACEH	Rp10.792.000	Rp6.022.000
106	BANJARMASIN	BATAM	Rp8.407.000	Rp4.578.000
107	BANJARMASIN	BIAK	Rp16.686.000	Rp8.749.000
108	BANJARMASIN	DENPASAR	Rp8.792.000	Rp4.920.000
109	BANJARMASIN	JAYAPURA	Rp17.135.000	Rp9.359.000
110	BANJARMASIN	YOGYAKARTA	Rp7.723.000	Rp4.022.000
111	BANJARMASIN	MEDAN	Rp10.546.000	Rp5.412.000
112	BANJARMASIN	PADANG	Rp9.006.000	Rp4.642.000
113	BANJARMASIN	PALEMBANG	Rp7.498.000	Rp4.022.000
114	BANJARMASIN	PEKANBARU	Rp9.049.000	Rp4.696.000
115	BANJARMASIN	SEMARANG	Rp7.498.000	Rp3.958.000
116	BANJARMASIN	SOLO	Rp7.498.000	Rp4.097.000
117	BANJARMASIN	SURABAYA	Rp8.942.000	Rp4.385.000
118	BANJARMASIN	TIMIKA	Rp16.472.000	Rp8.717.000
119	BATAM	BANDA ACEH	Rp10.439.000	Rp5.936.000
120	BATAM	DENPASAR	Rp8.450.000	Rp4.824.000
121	BATAM	JAYAPURA	Rp16.782.000	Rp9.263.000
122	BATAM	YOGYAKARTA	Rp7.370.000	Rp3.936.000
123	BATAM	MAKASSAR	Rp10.375.000	Rp5.337.000
124	BATAM	MANADO	Rp13.413.000	Rp6.482.000
125	BATAM	MEDAN	Rp10.193.000	Rp5.316.000
126	BATAM	PADANG	Rp8.653.000	Rp4.546.000
127	BATAM	PALEMBANG	Rp7.145.000	Rp3.936.000
128	BATAM	PEKANBARU	Rp8.707.000	Rp4.599.000
129	BATAM	PONTIANAK	Rp7.594.000	Rp4.396.000
130	BATAM	SEMARANG	Rp7.145.000	Rp3.861.000
131	BATAM	SOLO	Rp7.145.000	Rp4.000.000
132	BATAM	SURABAYA	Rp8.600.000	Rp4.300.000
133	BATAM	TIMIKA	Rp16.119.000	Rp8.621.000
134	BENGGULU	PALEMBANG	Rp2.899.000	Rp1.893.000
135	BIAK	BALIKPAPAN	Rp18.622.000	Rp9.477.000
136	BIAK	BANDA ACEH	Rp18.718.000	Rp10.108.000
137	BIAK	BATAM	Rp16.333.000	Rp8.664.000
138	BIAK	DENPASAR	Rp16.729.000	Rp8.995.000
139	BIAK	JAYAPURA	Rp3.615.000	Rp2.321.000
140	BIAK	YOGYAKARTA	Rp15.648.000	Rp8.108.000
141	BIAK	MANADO	Rp11.734.000	Rp6.353.000
142	BIAK	MEDAN	Rp18.472.000	Rp9.498.000
143	BIAK	PADANG	Rp16.932.000	Rp8.728.000
144	BIAK	PALEMBANG	Rp15.424.000	Rp8.108.000
145	BIAK	PEKANBARU	Rp16.985.000	Rp8.781.000
146	BIAK	PONTIANAK	Rp15.873.000	Rp8.568.000
147	BIAK	SURABAYA	Rp12.782.000	Rp7.081.000
148	BIAK	TIMIKA	Rp5.808.000	Rp3.444.000
149	DENPASAR	JAYAPURA	Rp11.680.000	Rp6.845.000
150	DENPASAR	KUPANG	Rp5.091.000	Rp2.952.000
151	DENPASAR	MAKASSAR	Rp4.182.000	Rp2.631.000
152	DENPASAR	MANADO	Rp7.851.000	Rp4.278.000
153	DENPASAR	MATARAM	Rp1.840.000	Rp1.390.000
154	DENPASAR	MEDAN	Rp10.589.000	Rp5.658.000
155	DENPASAR	PADANG	Rp9.049.000	Rp4.888.000

156	DENPASAR	PALANGKARAYA	Rp8.557.000	Rp4.909.000
157	DENPASAR	PALEMBANG	Rp7.541.000	Rp4.278.000
158	DENPASAR	PEKANBARU	Rp9.092.000	Rp4.942.999
159	DENPASAR	PONTIANAK	Rp7.990.000	Rp4.738.000
160	DENPASAR	TIMIKA	Rp10.140.000	Rp6.129.000
161	JAMBI	BALIKPAPAN	Rp7.733.000	Rp4.407.000
162	JAMBI	BANJARMASIN	Rp7.690.000	Rp4.193.000
163	JAMBI	DENPASAR	Rp7.733.000	Rp4.439.000
164	JAMBI	YOGYAKARTA	Rp6.653.000	Rp3.551.000
165	JAMBI	KUPANG	Rp11.434.000	Rp6.075.000
166	JAMBI	MAKASSAR	Rp9.659.000	Rp4.952.000
167	JAMBI	MALANG	Rp7.091.000	Rp3.925.000
168	JAMBI	MANADO	Rp12.707.000	Rp6.097.000
169	JAMBI	PALANGKARAYA	Rp7.444.000	Rp4.193.000
170	JAMBI	PONTIANAK	Rp6.878.000	Rp4.011.000
171	JAMBI	SEMARANG	Rp6.428.000	Rp3.476.000
172	JAMBI	SOLO	Rp6.428.000	Rp3.615.000
173	JAMBI	SURABAYA	Rp7.883.000	Rp3.915.000
174	JAYAPURA	YOGYAKARTA	Rp13.274.000	Rp7.690.000
175	JAYAPURA	MANADO	Rp22.109.000	Rp11.263.000
176	JAYAPURA	MEDAN	Rp18.932.000	Rp10.097.000
177	JAYAPURA	PADANG	Rp17.381.000	Rp9.327.000
178	JAYAPURA	PALEMBANG	Rp15.873.000	Rp8.717.000
179	JAYAPURA	PEKANBARU	Rp17.435.000	Rp9.380.000
180	JAYAPURA	PONTIANAK	Rp16.322.000	Rp9.177.000
181	JAYAPURA	TIMIKA	Rp3.615.000	Rp2.289.000
182	YOGYAKARTA	DENPASAR	Rp3.615.000	Rp2.481.000
183	YOGYAKARTA	MAKASSAR	Rp6.525.000	Rp3.893.000
184	YOGYAKARTA	MANADO	Rp10.536.000	Rp5.722.000
185	YOGYAKARTA	MEDAN	Rp9.519.000	Rp4.770.000
186	YOGYAKARTA	PADANG	Rp7.969.000	Rp4.000.000
187	YOGYAKARTA	PALEMBANG	Rp6.460.000	Rp3.380.000
188	YOGYAKARTA	PEKANBARU	Rp8.022.000	Rp4.054.000
189	YOGYAKARTA	PONTIANAK	Rp6.910.000	Rp3.840.000
190	YOGYAKARTA	TIMIKA	Rp11.894.000	Rp.7.038.000
191	KENDARI	BANDA ACEH	Rp12.953.000	Rp5.658.000
192	KENDARI	BATAM	Rp10.568.000	Rp3.273.000
193	KENDARI	DENPASAR	Rp5.455.000	Rp3.273.000
194	KENDARI	YOGYAKARTA	Rp8.129.000	Rp4.706.000
195	KENDARI	PADANG	Rp11.167.000	Rp5.722.000
196	KENDARI	PALEMBANG	Rp9.659.000	Rp5.102.000
197	KENDARI	PEKANBARU	Rp11.220.000	Rp5.776.000
198	KENDARI	SEMARANG	Rp9.659.000	Rp5.027.000
199	KENDARI	SOLO	Rp9.659.000	Rp5.166.000
200	KENDARI	SURABAYA	Rp11.103.000	Rp5.466.000
201	KENDARI	TIMIKA	Rp18.633.000	Rp9.798.000
202	KUPANG	JAYAPURA	Rp14.386.000	Rp8.108.000
203	KUPANG	YOGYAKARTA	Rp7.348.000	Rp4.182.000
204	KUPANG	MAKASSAR	Rp7.637.000	Rp4.311.000
205	KUPANG	MANADO	Rp11.648.000	Rp6.140.000
206	KUPANG	SURABAYA	Rp6.749.000	Rp3.722.000
207	MAKASSAR	BIAK	Rp8.493.000	Rp4.931.000
208	MAKASSAR	JAYAPURA	Rp10.193.000	Rp5.787.000
209	MAKASSAR	KENDARI	Rp2.663.000	Rp1.786.000
210	MAKASSAR	MANADO	Rp5.327.000	Rp2.909.000
211	MAKASSAR	TIMIKA	Rp11.723.000	Rp6.567.000
212	MALANG	BALIKPAPAN	Rp10.108.000	Rp5.134.000
213	MALANG	BANDA ACEH	Rp10.204.000	Rp5.765.000

214	MALANG	BANJARMASIN	Rp8.161.000	Rp4.407.000
215	MALANG	BATAM	Rp7.819.000	Rp4.311.000
216	MALANG	BIAK	Rp16.087.000	Rp8.482.000
217	MALANG	JAYAPURA	Rp16.536.000	Rp9.092.000
218	MALANG	KENDARI	Rp10.322.000	Rp5.487.000
219	MALANG	MAKASSAR	Rp10.129.000	Rp5.166.000
220	MALANG	MANADO	Rp13.167.000	Rp6.311.000
221	MALANG	MEDAN	Rp9.958.000	Rp5.145.000
222	MALANG	PADANG	Rp8.418.000	Rp4.385.000
223	MALANG	PALANGKARAYA	Rp7.915.000	Rp4.407.000
224	MALANG	PALEMBANG	Rp6.899.000	Rp3.765.000
225	MALANG	PEKANBARU	Rp8.461.000	Rp4.439.000
226	MALANG	TIMIKA	Rp15.873.000	Rp8.461.000
227	MANADO	MEDAN	Rp15.552.000	Rp7.316.000
228	MANADO	PADANG	Rp14.012.000	Rp6.549.000
229	MANADO	PALEMBANG	Rp12.504.000	Rp5.926.000
230	MANADO	PEKANBARU	Rp14.055.000	Rp5.699.000
231	MANADO	PONTIANAK	Rp12.953.000	Rp6.396.000
232	MANADO	SEMARANG	Rp12.504.000	Rp5.851.000
233	MANADO	SOLO	Rp12.504.000	Rp5.990.000
234	MANADO	SURABAYA	Rp9.937.000	Rp5.262.000
235	MANADO	TIMIKA	Rp16.183.000	Rp8.995.000
236	MATARAM	BALIKPAPAN	Rp10.750.000	Rp5.615.000
237	MATARAM	BANDA ACEH	Rp10.846.000	Rp6.246.000
238	MATARAM	BANJARMASIN	Rp8.803.000	Rp4.888.000
239	MATARAM	BATAM	Rp8.461.000	Rp4.803.000
240	MATARAM	BIAK	Rp1.152.000	Rp6.546.000
241	MATARAM	JAYAPURA	Rp13.092.000	Rp7.327.000
242	MATARAM	YOGYAKARTA	Rp4.417.000	Rp2.791.000
243	MATARAM	MAKASSAR	Rp4.417.000	Rp2.909.000
244	MATARAM	MANADO	Rp8.717.000	Rp4.738.000
245	MATARAM	MEDAN	Rp10.600.000	Rp5.637.000
246	MATARAM	PADANG	Rp9.060.000	Rp4.867.000
247	MATARAM	PALEMBANG	Rp7.551.000	Rp4.246.000
248	MATARAM	PEKANBARU	Rp9.102.000	Rp4.909.000
249	MATARAM	PONTIANAK	Rp9.001.000	Rp4.706.000
250	MATARAM	SURABAYA	Rp3.829.000	Rp2.321.000
251	MEDAN	BANDA ACEH	Rp3.466.000	Rp2.193.000
252	MEDAN	MAKASSAR	Rp12.514.000	Rp6.172.000
253	MEDAN	PONTIANAK	Rp9.733.000	Rp5.230.000
254	MEDAN	SEMARANG	Rp9.284.000	Rp4.696.000
255	MEDAN	SOLO	Rp9.284.000	Rp4.835.000
256	MEDAN	SURABAYA	Rp10.739.000	Rp5.134.000
257	MEDAN	TIMIKA	Rp18.258.000	Rp9.455.000
258	PADANG	MAKASSAR	Rp10.974.000	Rp5.402.000
259	PADANG	PONTIANAK	Rp8.193.000	Rp4.460.000
260	PADANG	SEMARANG	Rp7.744.000	Rp3.925.000
261	PADANG	SOLO	Rp7.744.000	Rp4.065.000
262	PADANG	SURABAYA	Rp9.199.000	Rp4.364.000
263	PADANG	TIMIKA	Rp16.718.000	Rp8.685.000
264	PALANGKARAYA	BANDA ACEH	Rp10.546.000	Rp6.022.000
265	PALANGKARAYA	BATAM	Rp8.161.000	Rp4.578.000
266	PALANGKARAYA	YOGYAKARTA	Rp7.477.000	Rp4.022.000
267	PALANGKARAYA	MATARAM	Rp8.557.000	Rp4.888.000
268	PALANGKARAYA	MEDAN	Rp10.300.000	Rp5.412.000
269	PALANGKARAYA	PADANG	Rp8.760.000	Rp4.642.000
270	PALANGKARAYA	PALEMBANG	Rp7.252.000	Rp4.022.000
271	PALANGKARAYA	PEKANBARU	Rp8.803.000	Rp4.696.000

272	PALANGKARAYA	SEMARANG	Rp7.252.000	Rp3.947.000
273	PALANGKARAYA	SOLO	Rp7.252.000	Rp4.086.000
274	PALANGKARAYA	SURABAYA	Rp8.696.000	Rp4.385.000
275	PALEMBANG	BALIKPAPAN	Rp9.894.000	Rp5.220.000
276	PALEMBANG	MAKASSAR	Rp9.466.000	Rp4.781.000
277	PALEMBANG	PONTIANAK	Rp6.685.000	Rp3.840.000
278	PALEMBANG	SEMARANG	Rp6.236.000	Rp3.305.000
279	PALEMBANG	SOLO	Rp6.236.000	Rp3.444.000
280	PALEMBANG	SURABAYA	Rp7.690.000	Rp3.744.000
281	PALEMBANG	TIMIKA	Rp15.210.000	Rp8.076.000
282	PALU	MAKASSAR	Rp4.268.000	Rp2.578.000
283	PALU	POSO	Rp1.957.000	Rp1.423.000
284	PALU	SORONG	Rp6.878.000	Rp3.883.000
285	PALU	SURABAYA	Rp6.878.000	Rp3.883.000
286	PALU	TOLI-TOLI	Rp2.941.000	Rp1.915.000
287	PANGKAL PINANG	BALIKPAPAN	Rp9.038.000	Rp4.631.000
288	PANGKAL PINANG	BANJARMASIN	Rp7.091.000	Rp3.915.000
289	PANGKAL PINANG	BATAM	Rp6.739.000	Rp3.818.000
290	PANGKAL PINANG	YOGYAKARTA	Rp6.065.000	Rp3.262.000
291	PANGKAL PINANG	MAKASSAR	Rp9.060.000	Rp4.663.000
292	PANGKAL PINANG	MANADO	Rp12.097.000	Rp5.808.000
293	PANGKAL PINANG	MEDAN	Rp8.888.000	Rp4.653.000
294	PANGKAL PINANG	PADANG	Rp7.337.000	Rp3.883.000
295	PANGKAL PINANG	PALEMBANG	Rp5.829.000	Rp3.262.000
296	PANGKAL PINANG	PEKANBARU	Rp7.391.000	Rp3.936.000
297	PANGKAL PINANG	PONTIANAK	Rp6.279.000	Rp3.733.000
298	PANGKAL PINANG	SEMARANG	Rp5.829.000	Rp3.187.000
299	PANGKAL PINANG	SOLO	Rp5.829.000	Rp3.326.000
300	PANGKAL PINANG	SURABAYA	Rp7.284.000	Rp3.626.000
301	PEKANBARU	PONTIANAK	Rp8.247.000	Rp4.514.000
302	PEKANBARU	SEMARANG	Rp7.797.000	Rp3.979.000
303	PEKANBARU	SOLO	Rp7.797.000	Rp4.118.000
304	PEKANBARU	SURABAYA	Rp9.241.000	Rp4.407.000
305	PEKANBARU	TIMIKA	Rp16.771.000	Rp8.739.000
306	PONTIANAK	MAKASSAR	Rp9.915.000	Rp5.241.000
307	PONTIANAK	SEMARANG	Rp6.685.000	Rp3.765.000
308	PONTIANAK	SOLO	Rp6.685.000	Rp3.904.000
309	PONTIANAK	SURABAYA	Rp8.140.000	Rp4.204.000
310	PONTIANAK	TIMIKA	Rp15.659.000	Rp8.535.000
311	SEMARANG	MAKASSAR	Rp9.466.000	Rp4.706.000
312	SOLO	MAKASSAR	Rp9.466.000	Rp4.845.000
313	SURABAYA	DENPASAR	Rp3.198.000	Rp1.979.000
314	SURABAYA	JAYAPURA	Rp12.675.000	Rp7.231.000
315	SURABAYA	MAKASSAR	Rp5.936.000	Rp3.433.000
316	SURABAYA	TIMIKA	Rp11.295.000	Rp6.589.000

Pembiayaan tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dalam Tabel 2.2, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*).

2.2 SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

Satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya untuk 1 (satu) kali perjalanan taksi:

a. Keberangkatan

- 1) Dari kantor tempat kedudukan asal menuju bandara, Pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat tujuan;
- 2) Dari bandara, Pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju tempat tujuan;

b. Kepulangan

- 1) Dari tempat tujuan menuju bandara, Pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat kedudukan asal; atau
- 2) Dari bandara, Pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju kantor tempat kedudukan asal.

Dalam hal lokasi kantor kedudukan atau lokasi tujuan tidak dapat dijangkau dengan taksi menuju atau dari bandara, Pelabuhan, terminal, atau stasiun, biaya transportasi menggunakan satuan biaya transportasi darat atau biaya transportasi lainnya,

Satuan Biaya Tiket Perjalanan Dinas Dalam Negeri terinci pada Tabel 2.3.

Pembiayaan satuan biaya taksi dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya taksi dalam negeri dalam Tabel 2.3. sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*).

TABEL 2.3
SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO	PROVINSI	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	ACEH	Orang/Kali	Rp123.000
2	SUMATERA UTARA	Orang/Kali	Rp232.000
3	RIAU	Orang/Kali	Rp94.000
4	KEPULAUAN RIAU	Orang/Kali	Rp137.000
5	JAMBI	Orang/Kali	Rp147.000
6	SUMATERA BARAT	Orang/Kali	Rp190.000
7	SUMATERA SELATAN	Orang/Kali	Rp128.000
8	LAMPUNG	Orang/Kali	Rp167.000
9	BENGKULU	Orang/Kali	Rp109.000
10	BANGKA BELITUNG	Orang/Kali	Rp90.000
11	BANTEN	Orang/Kali	Rp446.000
12	JAWA BARAT	Orang/Kali	Rp166.000
13	D.K.I JAKARTA	Orang/Kali	Rp256.000
14	JAWA TENGAH	Orang/Kali	Rp75.000
15	D.I. YOGYAKARTA	Orang/Kali	Rp118.000
16	JAWA TIMUR	Orang/Kali	Rp194.000
17	BALI	Orang/Kali	Rp159.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	Orang/Kali	Rp231.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	Orang/Kali	Rp108.000

20	KALIMANTAN BARAT	Orang/Kali	Rp135.000
21	KALIMANTAN TENGAH	Orang/Kali	Rp111.000
22	KALIMANTAN SELATAN	Orang/Kali	Rp150.000
23	KALIMANTAN TIMUR	Orang/Kali	Rp450.000
24	KALIMANTAN UTARA	Orang/Kali	Rp102.000
25	SULAWESI UTARA	Orang/Kali	Rp138.000
26	GORONTALIO	Orang/Kali	Rp240.000
27	SULAWESI BARAT	Orang/Kali	Rp313.000
28	SULAWESI SELATAN	Orang/Kali	Rp145.000
29	SULAWESI TENGAH	Orang/Kali	Rp165.000
30	SULAWESI TENGGARA	Orang/Kali	Rp171.000
31	MALUKU	Orang/Kali	Rp240.000
32	MALUKU UTARA	Orang/Kali	Rp215.000
33	PAPUA	Orang/Kali	Rp431.000
34	PAPUA BARAT	Orang/Kali	Rp182.000

Contoh 1:

Saudara A sebagai pejabat di instansi daerah melakukan perjalanan dinas jabatan dari Surabaya ke Kabupaten Pengunungan Bintang, alokasi biaya taksinya sebagai berikut:

a. Keberangkatan

- 1) Satuan biaya taksi dari tempat kedudukan (kantor) di Surabaya ke Bandara Juanda Surabaya;
- 2) Satuan biaya taksi dari Bandara Oksibil (Pegunungan Bintang) ke tempat tujuan (hotel, penginapan, atau kantor) di Kabupaten Pegunungan Bintang; dan
- 3) Satuan biaya transportasi darat dari hotel menuju tempat tujuan penugasan (tidak tersedia taksil menggunakan moda transportasi darat dapat diberikan pembiayaan secara *at cost*.

b. Kepulangan

- 1) Satuan biaya transportasi dari tempat tujuan menuju hotel penugasan menggunakan moda transportasi dapat diberikan pembiayaan secara *at cost*;
- 2) Satuan biaya taksi dari hotel atau penginapan (Pegunungan Bintang) ke Bandara Oksibil (Pegunungan Bintang); dan
- 3) Satuan biaya taksi dari Bandara Juanda di Surabaya ke tempat kedudukan (kantor).

Contoh 2:

Seorang B sebagai pegawai di instansi daerah melakukan perjalanan dinas Jabatan dari Surabaya ke Kecamatan Takabone Rate di Kabupaten Kepulauan Selayar, alokasi biaya taksinya sebagai berikut:

a. Keberangkatan

- 1) Satuan biaya taksi dari tempat kedudukan (kantor) di Surabaya ke Bandara Juanda Surabaya; dan

- 2) Satuan biaya taksi dari Bandara Kabupaten Kepulauan Selayar ke tempat tujuan (hotel, penginapan, atau kantor) di Kabupaten Kepulauan Selayar;
- 3) Satuan biaya transportasi dari hotel menuju tempat tujuan penugasan di Kecamatan Takabone Rate menggunakan moda transportasi darat dan laut diberikan pembiayaan secara *at cost*.

b. Kepulangan

- 1) Satuan biaya transportasi dari tempat tujuan di Kecamatan Takabone Rate menuju hotel penugasan menggunakan moda transportasi darat dan laut dapat diberikan pembiayaan secara *at cost*;
- 2) Satuan biaya taksi dari hotel/penginapan (di Kabupaten Kepulauan Selayar) ke bandara Kabupaten Kepulauan Selayar; dan
- 3) Satuan biaya taksi dari Bandara Juanda di Surabaya ke tempat kedudukan (kantor).

2.3 SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBUKOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (*ONE WAY*)

Satuan biaya transportasi darat dari ibu kota provinsi ke kabupaten/kota dalam provinsi yang sama (*one way* atau sekali jalan) merupakan satuan biaya untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi darat bagi pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dari tempat kedudukan di ibu kota provinsi ke tempat tujuan di kabupaten/kota tujuan dalam satu provinsi yang sama atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.

Satuan biaya Transportasi Darat dari Ibukota Provinsi ke Kabupaten/Kota dalam Provinsi Yang Sama (*one way*) terinci pada tabel 2.4

TABEL 2.4
SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBUKOTA KE
KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (*ONE WAY*)

NO	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	ACEH			
1	Banda Aceh	Kab. Aceh Barat	Orang/Kali	Rp275.000
2	Banda Aceh	Kab. Aceh Barat Daya	Orang/Kali	Rp298.000
3	Banda Aceh	Kab. Aceh Besar	Orang/Kali	Rp183.000
4	Banda Aceh	Kab. Aceh Jaya	Orang/Kali	Rp238.000
5	Banda Aceh	Kab. Aceh Selatan	Orang/Kali	Rp325.000
6	Banda Aceh	Kab. Aceh Singkil	Orang/Kali	Rp420.000
7	Banda Aceh	Kab. Aceh Tamiang	Orang/Kali	Rp315.000
8	Banda Aceh	Kab. Aceh Tengah	Orang/Kali	Rp293.000
9	Banda Aceh	Kab. Aceh Tenggara	Orang/Kali	Rp460.000
10	Banda Aceh	Kab. Aceh Timur	Orang/Kali	Rp289.000
11	Banda Aceh	Kab. Aceh Utara	Orang/Kali	Rp270.000

12	Banda Aceh	Kab. Bener Meriah	Orang/Kali	Rp278.000
13	Banda Aceh	Kab. Birueun	Orang/Kali	Rp220.000
14	Banda Aceh	Kab. Gayo Lues	Orang/Kali	Rp370.000
15	Banda Aceh	Kab. Nagan Raya	Orang/Kali	Rp275.000
16	Banda Aceh	Kab. Pidie	Orang/Kali	Rp190.000
17	Banda Aceh	Kab. Pidie Jaya	Orang/Kali	Rp205.000
18	Banda Aceh	Kota Langsa	Orang/Kali	Rp301.000
19	Banda Aceh	Kota Lhokseumawe	Orang/Kali	Rp240.000
20	Banda Aceh	Kota Subulussalam	Orang/Kali	Rp400.000
	SUMATERA UTARA			
21	Medan	Kab. Asahan	Orang/Kali	Rp259.000
22	Medan	Kab. Batubara	Orang/Kali	Rp225.000
23	Medan	Kab. Dairi	Orang/Kali	Rp270.000
24	Medan	Kab. Deli Serdang	Orang/Kali	Rp186.000
25	Medan	Kab. Humbang Hasundutan	Orang/Kali	Rp300.000
26	Medan	Kab. Karo	Orang/Kali	Rp200.000
27	Medan	Kab. Labuhan Batu	Orang/Kali	Rp287.000
28	Medan	Kab. Labuhan Batu Selatan	Orang/Kali	Rp360.000
29	Medan	Kab. Labuhan Batu Utara	Orang/Kali	Rp300.000
30	Medan	Kab. Langkat	Orang/Kali	Rp186.000
31	Medan	Kab. Mandailing Natal	Orang/Kali	Rp420.000
32	Medan	Kab. Padang Lawas	Orang/Kali	Rp420.000
33	Medan	Kab. Padang Lawas Utara	Orang/Kali	Rp420.000
34	Medan	Kab. Pakpak Bharat	Orang/Kali	Rp300.000
35	Medan	Kab. Samosir	Orang/Kali	Rp330.000
36	Medan	Kab. Sedang Bedagai	Orang/Kali	Rp200.000
37	Medan	Kab. Simalungun	Orang/Kali	Rp264.000
38	Medan	Kab. Tapanuli Selatan	Orang/Kali	Rp328.000
39	Medan	Kab. Tapanuli Tengah	Orang/Kali	Rp345.000
40	Medan	Kab. Tapanuli Utara	Orang/Kali	Rp330.000
41	Medan	Kab. Toba	Orang/Kali	Rp300.000
42	Medan	Kota Binjai	Orang/Kali	Rp180.000
43	Medan	Kota Pematang Siantar	Orang/Kali	Rp225.000
44	Medan	Kota Sibolga	Orang/Kali	Rp345.000
45	Medan	Kota Tanjung Balai	Orang/Kali	Rp285.000
46	Medan	Kota Tebing Tinggi	Orang/Kali	Rp203.000
	RIAU			
47	Pekanbaru	Kab. Indragiri Hilir	Orang/Kali	Rp380.000
48	Pekanbaru	Kab. Indragiri Hulu	Orang/Kali	Rp315.000
49	Pekanbaru	Kab. Kampar	Orang/Kali	Rp200.000
50	Pekanbaru	Kab. Kutantan Singingi	Orang/Kali	Rp300.000
51	Pekanbaru	Kab. Pelalawan	Orang/Kali	Rp225.000
52	Pekanbaru	Kab. Rokan Hilir	Orang/Kali	Rp350.000
53	Pekanbaru	Kab. Rokan Hulu	Orang/Kali	Rp322.000
54	Pekanbaru	Kab. Siak	Orang/Kali	Rp350.000
55	Pekanbaru	Kota Dumai	Orang/Kali	Rp400.000
	KEPULAUAN RIAU			
56	Tanjung Pinang	Kab. Bintan	Orang/Kali	Rp185.000
	JAMBI			
57	Jambi	Kab. Batanghari	Orang/Kali	Rp175.000
58	Jambi	Kab. Bungo	Orang/Kali	Rp270.000
59	Jambi	Kab. Kerinci	Orang/Kali	Rp325.000
60	Jambi	Kab. Merangin	Orang/Kali	Rp260.000
61	Jambi	Kab. Muaro Jambi	Orang/Kali	Rp170.000
62	Jambi	Kab. Sarolangun	Orang/Kali	Rp241.000

63	Jambi	Kab. Tanjung Jabung Barat	Orang/Kali	Rp225.000
64	Jambi	Kab. Tanjung Jabung Timur	Orang/Kali	Rp190.000
65	Jambi	Kab. Tebo	Orang/Kali	Rp250.000
66	Jambi	Kota Sungai Penuh	Orang/Kali	Rp308.000
SUMATERA BARAT				
67	Padang	Kab. Agam	Orang/Kali	Rp225.000
68	Padang	Kab. Dharmasraya	Orang/Kali	Rp250.000
69	Padang	Kab. Lima Puluh Kota	Orang/Kali	Rp225.000
70	Padang	Kab. Padang Pariaman	Orang/Kali	Rp205.000
71	Padang	Kab. Pasaman	Orang/Kali	Rp250.000
72	Padang	Kab. Pasaman Barat	Orang/Kali	Rp250.000
73	Padang	Kab. Pesisir Selatan	Orang/Kali	Rp205.000
74	Padang	Kab. Sijunjung	Orang/Kali	Rp225.000
75	Padang	Kab. Solok	Orang/Kali	Rp210.000
76	Padang	Kab. Solok Selatan	Orang/Kali	Rp250.000
77	Padang	Kab. Tanah Datar	Orang/Kali	Rp220.000
78	Padang	Kota Bukit Tinggi	Orang/Kali	Rp215.000
79	Padang	Kota Padang Panjang	Orang/Kali	Rp210.000
80	Padang	Kota Pariaman	Orang/Kali	Rp200.000
81	Padang	Kota Payakumbuh	Orang/Kali	Rp225.000
82	Padang	Kota Sawahlunti	Orang/Kali	Rp215.000
83	Padang	Kota Solok	Orang/Kali	Rp210.000
SUMATERA SELATAN				
84	Palembang	Kab. Banyuasin	Orang/Kali	Rp203.000
85	Palembang	Kab. Empat Lawang	Orang/Kali	Rp315.000
86	Palembang	Kab. Lahat	Orang/Kali	Rp250.000
87	Palembang	Kab. Muara Enim	Orang/Kali	Rp235.000
88	Palembang	Kab. Musi Banyuasin	Orang/Kali	Rp235.000
89	Palembang	Kab. Musi Rawas	Orang/Kali	Rp320.000
90	Palembang	Kab. Musi Rawas Utara	Orang/Kali	Rp325.000
91	Palembang	Kab. Ogan Ilir	Orang/Kali	Rp205.000
92	Palembang	Kab. Ogan Komering Ilir	Orang/Kali	Rp205.000
93	Palembang	Kab. Ogan Komreing Ulu	Orang/Kali	Rp248.000
94	Palembang	Kab. Ogan Komreing Ulu Selatan	Orang/Kali	Rp250.000
95	Palembang	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	Orang/Kali	Rp245.000
96	Palembang	Kab. Pali	Orang/Kali	Rp265.000
97	Palembang	Kota Lubung Linggau	Orang/Kali	Rp290.000
98	Palembang	Kota Pagar Alam	Orang/Kali	Rp280.000
99	Palembang	Kota Prabumulih	Orang/Kali	Rp205.000
LAMPUNG				
100	Bandar Lampung	Kab. Lampung Barat	Orang/Kali	Rp270.000
101	Bandar Lampung	Kab. Lampung Selatan	Orang/Kali	Rp234.000
102	Bandar Lampung	Kab. Lampung Tengah	Orang/Kali	Rp246.000
103	Bandar Lampung	Kab. Lampung Timur	Orang/Kali	Rp246.000
104	Bandar Lampung	Kab. Lampung Utara	Orang/Kali	Rp252.000
105	Bandar Lampung	Kab. Mesuji	Orang/Kali	Rp276.000
106	Bandar Lampung	Kab. Pesawaran	Orang/Kali	Rp216.000
107	Bandar Lampung	Kab. Pesisir Barat	Orang/Kali	Rp200.000
108	Bandar Lampung	Kab. Pringsewu	Orang/Kali	Rp222.000
109	Bandar Lampung	Kab. Tanggamus	Orang/Kali	Rp240.000
110	Bandar Lampung	Kab. Tulang Bawang	Orang/Kali	Rp252.000
111	Bandar Lampung	Kab. Tulang Bawang Barat	Orang/Kali	Rp267.000
112	Bandar Lampung	Kab. Way Kanan	Orang/Kali	Rp227.000

113	Bandar Lampung	Kota Metro	Orang/Kali	Rp234.000
	BENGGKULU			
114	Bengkulu	Kab. Bengkulu Selatan	Orang/Kali	Rp344.000
115	Bengkulu	Kab. Bengkulu Tengah	Orang/Kali	Rp232.000
116	Bengkulu	Kab. Bengkulu Utara	Orang/Kali	Rp313.000
117	Bengkulu	Kab. Kaur	Orang/Kali	Rp385.000
118	Bengkulu	Kab. Kepahiang	Orang/Kali	Rp298.000
119	Bengkulu	Kab. Lebong	Orang/Kali	Rp375.000
120	Bengkulu	Kab. Mukomuko	Orang/Kali	Rp423.000
121	Bengkulu	Kab. Rejang Lebong	Orang/Kali	Rp313.000
122	Bengkulu	Kab. Seluma	Orang/Kali	Rp282.000
	BANGKA BELITUNG			
123	Pangkalpinang	Kab. Bangka	Orang/Kali	Rp250.000
124	Pangkalpinang	Kab. Bangka Barat	Orang/Kali	Rp275.000
125	Pangkalpinang	Kab. Bangka Selatan	Orang/Kali	Rp275.000
126	Pangkalpinang	Kab. Bangka Tengah	Orang/Kali	Rp250.000
	BANTEN			
127	Serang	Kab. Lebak	Orang/Kali	Rp208.000
128	Serang	Kab. Padeglang	Orang/Kali	Rp138.000
129	Serang	Kab. Serang	Orang/Kali	Rp160.000
130	Serang	Kab. Tangerang	Orang/Kali	Rp254.000
131	Serang	Kab. Cilegon	Orang/Kali	Rp160.000
132	Serang	Kota Tangerang	Orang/Kali	Rp313.000
133	Serang	Kota Tangerang Selatan	Orang/Kali	Rp347.000
	JAWA BARAT			
134	Bandung	Kab. Bandung	Orang/Kali	Rp183.000
135	Bandung	Kab. Bandung Barat	Orang/Kali	Rp275.000
136	Bandung	Kab. Bekasi	Orang/Kali	Rp265.000
137	Bandung	Kab. Bogor	Orang/Kali	Rp185.000
138	Bandung	Kab. Ciamis	Orang/Kali	Rp245.000
139	Bandung	Kab. Cianjur	Orang/Kali	Rp215.000
140	Bandung	Kab. Cirebon	Orang/Kali	Rp280.000
141	Bandung	Kab. Garut	Orang/Kali	Rp243.000
142	Bandung	Kab. Indramayu	Orang/Kali	Rp275.000
143	Bandung	Kab. Karawang	Orang/Kali	Rp248.000
144	Bandung	Kab. Kuningan	Orang/Kali	Rp275.000
145	Bandung	Kab. Majalengka	Orang/Kali	Rp235.000
146	Bandung	Kab. Pangadaran	Orang/Kali	Rp283.000
147	Bandung	Kab. Purwakarta	Orang/Kali	Rp218.000
148	Bandung	Kab. Subang	Orang/Kali	Rp208.000
149	Bandung	Kab. Sukabumi	Orang/Kali	Rp245.000
150	Bandung	Kab. Sumedang	Orang/Kali	Rp230.000
151	Bandung	Kab. Tasikmalaya	Orang/Kali	Rp245.000
152	Bandung	Kota Banjar	Orang/Kali	Rp283.000
153	Bandung	Kota Bekasi	Orang/Kali	Rp265.000
154	Bandung	Kota Bogor	Orang/Kali	Rp285.000
155	Bandung	Kota Cimahi	Orang/Kali	Rp168.000
156	Bandung	Kota Cirebon	Orang/Kali	Rp270.000
157	Bandung	Kota Depok	Orang/Kali	Rp275.000
158	Bandung	Kota Sukabumi	Orang/Kali	Rp226.000
159	Bandung	Kota Tasikmalaya	Orang/Kali	Rp245.000
	JAWA TENGAH			
160	Semarang	Kab. Banjarnegara	Orang/Kali	Rp260.000
161	Semarang	Kab. Banyumas	Orang/Kali	Rp257.000
162	Semarang	Kab. Batang	Orang/Kali	Rp240.000
163	Semarang	Kab. Blora	Orang/Kali	Rp270.000
164	Semarang	Kab. Boyolali	Orang/Kali	Rp240.000
165	Semarang	Kab. Brebes	Orang/Kali	Rp263.000

166	Semarang	Kab. Cilacap	Orang/Kali	Rp280.000
167	Semarang	Kab. Demak	Orang/Kali	Rp230.000
168	Semarang	Kab. Grobogan	Orang/Kali	Rp235.000
169	Semarang	Kab. Jepara	Orang/Kali	Rp240.000
170	Semarang	Kab. Karanganyar	Orang/Kali	Rp250.000
171	Semarang	Kab. Kebumen	Orang/Kali	Rp260.000
172	Semarang	Kab. Kendal	Orang/Kali	Rp230.000
173	Semarang	Kab. Klaten	Orang/Kali	Rp250.000
174	Semarang	Kab. Kudus	Orang/Kali	Rp235.000
175	Semarang	Kab. Magelang	Orang/Kali	Rp240.000
176	Semarang	Kab. Pati	Orang/Kali	Rp240.000
177	Semarang	Kab. Pekalongan	Orang/Kali	Rp245.000
178	Semarang	Kab. Pemalang	Orang/Kali	Rp250.000
179	Semarang	Kab. Purbalingga	Orang/Kali	Rp270.000
180	Semarang	Kab. Purworejo	Orang/Kali	Rp250.000
181	Semarang	Kab. Rembang	Orang/Kali	Rp250.000
182	Semarang	Kab. Semarang	Orang/Kali	Rp230.000
183	Semarang	Kab. Sragen	Orang/Kali	Rp250.000
184	Semarang	Kab. Sukoharjo	Orang/Kali	Rp250.000
185	Semarang	Kab. Tegal	Orang/Kali	Rp260.000
186	Semarang	Kab. Temanggung	Orang/Kali	Rp240.000
187	Semarang	Kab. Wonogiri	Orang/Kali	Rp250.000
188	Semarang	Kab. Wonosobo	Orang/Kali	Rp250.000
189	Semarang	Kota Magelang	Orang/Kali	Rp240.000
190	Semarang	Kota Pekalongan	Orang/Kali	Rp245.000
191	Semarang	Kota Salatiga	Orang/Kali	Rp235.000
192	Semarang	Kota Surakarta	Orang/Kali	Rp245.000
193	Semarang	Kota Tegal	Orang/Kali	Rp260.000
D.I. YOGYAKARTA				
194	Yogyakarta	Kab. Bantul	Orang/Kali	Rp250.000
195	Yogyakarta	Kab. Gunung Kidul	Orang/Kali	Rp350.000
196	Yogyakarta	Kab. Kulon Progo	Orang/Kali	Rp350.000
197	Yogyakarta	Kab. Sleman	Orang/Kali	Rp200.000
JAWA TIMUR				
198	Surabaya	Kab. Bangkalan	Orang/Kali	Rp225.000
199	Surabaya	Kab. Banyuwangi	Orang/Kali	Rp285.000
200	Surabaya	Kab. Blitar	Orang/Kali	Rp255.000
201	Surabaya	Kab. Bojonegoro	Orang/Kali	Rp225.000
202	Surabaya	Kab. Bondowoso	Orang/Kali	Rp255.000
203	Surabaya	Kab. Gresik	Orang/Kali	Rp225.000
204	Surabaya	Kab. Jember	Orang/Kali	Rp261.000
205	Surabaya	Kab. Jombang	Orang/Kali	Rp235.000
206	Surabaya	Kab. Kediri	Orang/Kali	Rp235.000
207	Surabaya	Kab. Lamongan	Orang/Kali	Rp225.000
208	Surabaya	Kab. Lumajang	Orang/Kali	Rp261.000
209	Surabaya	Kab. Madiun	Orang/Kali	Rp245.000
210	Surabaya	Kab. Magetan	Orang/Kali	Rp253.000
211	Surabaya	Kab. Malang	Orang/Kali	Rp228.000
212	Surabaya	Kab. Mojokerto	Orang/Kali	Rp225.000
213	Surabaya	Kab. Nganjuk	Orang/Kali	Rp245.000
214	Surabaya	Kab. Ngawi	Orang/Kali	Rp253.000
215	Surabaya	Kab. Pacitan	Orang/Kali	Rp285.000
216	Surabaya	Kab. Pemasakan	Orang/Kali	Rp243.000
217	Surabaya	Kab. Pasuruan	Orang/Kali	Rp228.000
218	Surabaya	Kab. Ponorogo	Orang/Kali	Rp255.000
219	Surabaya	Kab. Probolinggo	Orang/Kali	Rp228.000
220	Surabaya	Kab. Sampang	Orang/Kali	Rp235.000
221	Surabaya	Kab. Sidoarjo	Orang/Kali	Rp240.000

222	Surabaya	Kab. Situbondo	Orang/Kali	Rp255.000
223	Surabaya	Kab. Semenep	Orang/Kali	Rp255.000
224	Surabaya	Kab. Trenggalek	Orang/Kali	Rp245.000
225	Surabaya	Kab. Tuban	Orang/Kali	Rp245.000
226	Surabaya	Kab. Tulungagung	Orang/Kali	Rp245.000
227	Surabaya	Kota Batu	Orang/Kali	Rp242.000
228	Surabaya	Kota Blitar	Orang/Kali	Rp255.000
229	Surabaya	Kota Bojonegoro	Orang/Kali	Rp225.000
230	Surabaya	Kota Kediri	Orang/Kali	Rp235.000
231	Surabaya	Kota Madiun	Orang/Kali	Rp245.000
232	Surabaya	Kota Malang	Orang/Kali	Rp228.000
233	Surabaya	Kota Mojokerto	Orang/Kali	Rp225.000
234	Surabaya	Kota Probolinggo	Orang/Kali	Rp228.000
BALI				
235	Denpasar	Kab. Badung	Orang/Kali	Rp188.000
236	Denpasar	Kab. Bangli	Orang/Kali	Rp225.000
237	Denpasar	Kab. Buleleng	Orang/Kali	Rp265.000
238	Denpasar	Kab. Gianyar	Orang/Kali	Rp225.000
239	Denpasar	Kab. Jembrana	Orang/Kali	Rp270.000
240	Denpasar	Kab. Karangasem	Orang/Kali	Rp263.000
241	Denpasar	Kab. Tabanam	Orang/Kali	Rp225.000
NUSA TENGGARA BARAT				
242	Mataram	Kab. Lombok Barat	Orang/Kali	Rp325.000
243	Mataram	Kab. Lombok Tengah	Orang/Kali	Rp450.000
244	Mataram	Kab. Lombok Timur	Orang/Kali	Rp350.000
NUSA TENGGARA TIMUR				
245	Kupang	Kab. Belu	Orang/Kali	Rp325.000
246	Kupang	Kab. Kupang	Orang/Kali	Rp175.000
247	Kupang	Kab. Timor Tengah Selatan	Orang/Kali	Rp218.000
248	Kupang	Kab. Timor Tengah Utara	Orang/Kali	Rp275.000
KALIMANTAN BARAT				
249	Pontianak	Kab. Bengkayang	Orang/Kali	Rp270.000
250	Pontianak	Kab. Kapuas Hulu	Orang/Kali	Rp550.000
251	Pontianak	Kab. Kayong Utara	Orang/Kali	Rp550.000
252	Pontianak	Kab. Ketapang	Orang/Kali	Rp550.000
253	Pontianak	Kab. Kubu Raya	Orang/Kali	Rp185.000
254	Pontianak	Kab. Landak	Orang/Kali	Rp270.000
255	Pontianak	Kab. Melawi	Orang/Kali	Rp430.000
256	Pontianak	Kab. Mempawah	Orang/Kali	Rp230.000
257	Pontianak	Kab. Sambas	Orang/Kali	Rp300.000
258	Pontianak	Kab. Sanggau	Orang/Kali	Rp303.000
259	Pontianak	Kab. Sekadau	Orang/Kali	Rp343.000
260	Pontianak	Kab. Sintang	Orang/Kali	Rp392.000
261	Pontianak	Kota Singkawang	Orang/Kali	Rp257.000
KALIMANTAN TENGAH				
262	Palangkaraya	Kab. Barito Selatan	Orang/Kali	Rp290.000
263	Palangkaraya	Kab. Barito Timur	Orang/Kali	Rp333.000
264	Palangkaraya	Kab. Barito Utara	Orang/Kali	Rp425.000
265	Palangkaraya	Kab. Gungung Mas	Orang/Kali	Rp300.000
266	Palangkaraya	Kab. Kapuas Hulu	Orang/Kali	Rp275.000
267	Palangkaraya	Kab. Katingan	Orang/Kali	Rp250.000
268	Palangkaraya	Kab. Kotawaringin Barat	Orang/Kali	Rp425.000
269	Palangkaraya	Kab. Kotawaringin Timur	Orang/Kali	Rp300.000
270	Palangkaraya	Kab. Lemandau	Orang/Kali	Rp525.000
271	Palangkaraya	Kab. Murung Raya	Orang/Kali	Rp448.000
272	Palangkaraya	Kab. Pulau Pisau	Orang/Kali	Rp250.000
273	Palangkaraya	Kab. Seruyan	Orang/Kali	Rp328.000
274	Palangkaraya	Kab. Sukamara	Orang/Kali	Rp525.000

KALIMANTAN SELATAN				
275	Banjarmasin	Kab. Balangan	Orang/Kali	Rp230.000
276	Banjarmasin	Kab. Banjar	Orang/Kali	Rp170.000
277	Banjarmasin	Kab. Barito Kuala	Orang/Kali	Rp200.000
278	Banjarmasin	Kab. Hulu Sungai Selatan	Orang/Kali	Rp200.000
279	Banjarmasin	Kab. Hulu Sungai Tengah	Orang/Kali	Rp212.000
280	Banjarmasin	Kab. Hulu Sungai Utara	Orang/Kali	Rp218.000
281	Banjarmasin	Kab. Kota Baru	Orang/Kali	Rp290.000
282	Banjarmasin	Kab. Tabalong	Orang/Kali	Rp234.000
283	Banjarmasin	Kab. Tanah Bumbu	Orang/Kali	Rp300.000
284	Banjarmasin	Kab. Tanah Laut	Orang/Kali	Rp200.000
285	Banjarmasin	Kab. Tapin	Orang/Kali	Rp189.000
286	Banjarmasin	Kota Banjarbaru	Orang/Kali	Rp225.000
KALIMANTAN TIMUR				
287	Samarinda	Kab. Kutai Barat	Orang/Kali	Rp1.500.000
288	Samarinda	Kab. Kutai Kartanegara	Orang/Kali	Rp500.000
289	Samarinda	Kab. Kutai Timur	Orang/Kali	Rp1.350.000
290	Samarinda	Kab. Paser	Orang/Kali	Rp1.650.000
291	Samarinda	Kab. Penajam Paser Utara	Orang/Kali	Rp650.000
292	Samarinda	Kota Balikpapan	Orang/Kali	Rp550.000
293	Samarinda	Kota Bontang	Orang/Kali	Rp600.000
SULAWESI UTARA				
294	Manado	Kab. Bolaang Mongondow	Orang/Kali	Rp250.000
295	Manado	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	Orang/Kali	Rp275.000
296	Manado	Kab. Bolaang Mongondow Timur	Orang/Kali	Rp250.000
297	Manado	Kab. Bolaang Mongondow Utara	Orang/Kali	Rp300.000
298	Manado	Kab. Minahasa	Orang/Kali	Rp180.000
299	Manado	Kab. Minahasa Selatan	Orang/Kali	Rp180.000
300	Manado	Kab. Minahasa Tenggara	Orang/Kali	Rp200.000
301	Manado	Kab. Minahasa Utara	Orang/Kali	Rp175.000
302	Manado	Kota Bitung	Orang/Kali	Rp175.000
303	Manado	Kota Kotabagu	Orang/Kali	Rp250.000
304	Manado	Kota Tamohon	Orang/Kali	Rp170.000
GORONTALO				
305	Gorontalo	Kab. Boalemo	Orang/Kali	Rp400.000
306	Gorontalo	Kab. Gorontalo	Orang/Kali	Rp300.000
307	Gorontalo	Kab. Gorontalo Utara	Orang/Kali	Rp350.000
308	Gorontalo	Kab. Pahuwato	Orang/Kali	Rp650.000
SULAWESI BARAT				
309	Mamuju	Kab. Majene	Orang/Kali	Rp240.000
310	Mamuju	Kab. Mamasa	Orang/Kali	Rp359.000
311	Mamuju	Kab. Mamuju Tengah	Orang/Kali	Rp200.000
312	Mamuju	Kab. Pasangkayu	Orang/Kali	Rp270.000
313	Mamuju	Kab. Polewali Mandar	Orang/Kali	Rp260.000
SULAWESI SELATAN				
314	Makassar	Kab. Bantaeng	Orang/Kali	Rp235.000
315	Makassar	Kab. Barru	Orang/Kali	Rp210.000
316	Makassar	Kab. Bone	Orang/Kali	Rp240.000
317	Makassar	Kab. Bulukumba	Orang/Kali	Rp240.000
318	Makassar	Kab. Enrekang	Orang/Kali	Rp250.000
319	Makassar	Kab. Gowa	Orang/Kali	Rp175.000
320	Makassar	Kab. Jeneponto	Orang/Kali	Rp230.000
321	Makassar	Kab. Luwu	Orang/Kali	Rp350.000
322	Makassar	Kab. Luwu Timur	Orang/Kali	Rp375.000
323	Makassar	Kab. Luwu Utara	Orang/Kali	Rp365.000

324	Makassar	Kab. Maros	Orang/Kali	Rp170.000
325	Makassar	Kab. Pinrang	Orang/Kali	Rp230.000
326	Makassar	Kab. Sidenreng Rappang	Orang/Kali	Rp230.000
327	Makassar	Kab. Sinjai	Orang/Kali	Rp235.000
328	Makassar	Kab. Soppeng	Orang/Kali	Rp235.000
329	Makassar	Kab. Takalar	Orang/Kali	Rp190.000
330	Makassar	Kab. Tantoraja	Orang/Kali	Rp350.000
331	Makassar	Kab. Toraja Utara	Orang/Kali	Rp350.000
332	Makassar	Kab. Wajo	Orang/Kali	Rp230.000
333	Makassar	Kota Palopo	Orang/Kali	Rp350.000
334	Makassar	Kota Pare-Pre	Orang/Kali	Rp225.000
SULAWESI TENGAH				
335	Palu	Kab. Luwuk	Orang/Kali	Rp400.000
336	Palu	Kab. Buol	Orang/Kali	Rp472.000
337	Palu	Kab. Donggala	Orang/Kali	Rp130.000
338	Palu	Kab. Morowali	Orang/Kali	Rp400.000
339	Palu	Kab. Morowali Utara	Orang/Kali	Rp400.000
340	Palu	Kab. Parigi Mountong	Orang/Kali	Rp250.000
341	Palu	Kab. Poso	Orang/Kali	Rp280.000
342	Palu	Kab. Sigi	Orang/Kali	Rp219.000
343	Palu	Kab. Tojouna-Una	Orang/Kali	Rp350.000
344	Palu	Kab. Toli-Toli	Orang/Kali	Rp412.000
SULAWESI TENGGARA				
345	Kendari	Kab. Bombana	Orang/Kali	Rp355.000
346	Kendari	Kab. Kolaka	Orang/Kali	Rp370.000
347	Kendari	Kab. Kolaka Timur	Orang/Kali	Rp300.000
348	Kendari	Kab. Kolaka Utara	Orang/Kali	Rp425.000
349	Kendari	Kab. Konawe	Orang/Kali	Rp300.000
350	Kendari	Kab. Konawe Selatan	Orang/Kali	Rp305.000
351	Kendari	Kab. Konawe Utara	Orang/Kali	Rp300.000
MALUKU UTARA				
352	Sofifi	Kab. Halmehara Barata	Orang/Kali	Rp850.000
353	Sofifi	Kab. Halmehara Tengah	Orang/Kali	Rp1.000.000
354	Sofifi	Kab. Halmehara Timur	Orang/Kali	Rp1.250.000
355	Sofifi	Kab. Halmehara Utara	Orang/Kali	Rp900.000
PAPUA				
356	Jayapura	Kab. Jayapura	Orang/Kali	Rp600.000
357	Jayapura	Kab. Keerom	Orang/Kali	Rp900.000
358	Jayapura	Kab. Sarmi	Orang/Kali	Rp2.700.000
359	Jayapura	Kab. Merauke	Orang/Kali	Rp1.134.000
PAPUA BARAT				
360	Manokwari	Kab. Telik Bintuni	Orang/Kali	Rp900.000
361	Manokwari	Kab. Manokwari Selatan	Orang/Kali	Rp750.000
362	Manokwari	Kab. Pegunungan Arfak	Orang/Kali	Rp2.650.000
363	Manokwari	Kota Sorong	Orang/Kali	Rp1.000.000

2.4 SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI DKI JAKARTA KE KABUPATEN/KOTA SEKITAR (ONE WAY)

Satuan biaya transportasi dari DKI Jakarta ke kabupaten/kota sekitar merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi bagi pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dari tempat kedudukan di DKI Jakarta ke tempat tujuan di Kabupaten/Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten/Kota Bekasi, Kabupaten/Bogor, Kota

Depok, Kabupaten/Kota Bekasi, Kabupaten/Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Kepulauan seribu atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.

Satuan Biaya Transportasi Darat dari DKI Jakarta ke Kabupaten/Kota Sekitar (*One Way*) terinci pada Tabel 2.5

TABEL 2.5
SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARI DKI JAKARTA
KE KABUPATEN / KOTA SEKITAR (*ONE WAY*)

NO	IBUKITA PROVINSI	KABUPATEN / KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Jakarta	Kota Bekasi	Orang/Kali	Rp284.000
2	Jakarta	Kab. Bekasi	Orang/Kali	Rp284.000
3	Jakarta	Kab. Bogor	Orang/Kali	Rp300.000
4	Jakarta	Kota Bogor	Orang/Kali	Rp300.000
5	Jakarta	Kota Depok	Orang/Kali	Rp275.000
6	Jakarta	Kota Tangerang	Orang/Kali	Rp286.000
7	Jakarta	Kota Tangerang selatan	Orang/Kali	Rp286.000
8	Jakarta	Kab. Tangerang	Orang/Kali	Rp310.000
9	Jakarta	Kepulauan Seribu	Orang/Kali	Rp428.000

3. SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT

Satuan biaya konsumsi rapat merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan makan dan kudapan, termasuk minuman untuk rapat atau pertemuan:

- a. Rapat koordinasi tingkat kepala daerah, eselon I, atau setara yang pesertanya Menteri, eselon I, atau pejabat yang setara; atau
- b. Rapat biasa yang pesertanya melibatkan satuan kerja lainnya, eselon II lainnya, eselon I lainnya, kementerian negara, lembaga lainnya, instansi pemerintah, dan/atau masyarakat dan dilaksanakan minimal selama 2 (dua) jam.

Satuan Biaya Konsumsi Rapat terinci pada Tabel 2.6.

TABEL 2.6
SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT

NO	PROVINSI	SATUAN	MAKAN	KUDAPAN (SNACK)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	RAPAT KOORDINASI TINGKAT KEPALA DAERAH / ESELON I/ SETARA	Orang/Kali	Rp110.000	Rp49.000
2	RAPAT BIASA			
	2.1 ACEH	Orang/Kali	Rp51.000	Rp19.000
	2.2 SUMATERA UTARA	Orang/Kali	Rp47.000	Rp17.000
	2.3 RIAU	Orang/Kali	Rp40.000	Rp16.000
	2.4 KEPULAUAN RIAU	Orang/Kali	Rp10.000	Rp25.000
	2.5 JAMBI	Orang/Kali	Rp42.000	Rp17.000
	2.6 SUMATERA BARAT	Orang/Kali	Rp44.000	Rp17.000

2.7 SUMATERA SELATAN	Orang/Kali	Rp46.000	Rp17.000
2.8 LAMPUNG	Orang/Kali	Rp40.000	Rp20.000
2.9 BENGKULU	Orang/Kali	Rp44.000	Rp16.000
2.10 BANGKA BELITUNG	Orang/Kali	Rp40.000	Rp18.000
2.11 BANTEN	Orang/Kali	Rp54.000	Rp19.000
2.12 JAWA BARAT	Orang/Kali	Rp45.000	Rp20.000
2.13 D.K.I. JAKARTA	Orang/Kali	Rp47.000	Rp22.000
2.14 JAWA TENGAH	Orang/Kali	Rp38.000	Rp15.000
2.15 D.I. YOGYAKARTA	Orang/Kali	Rp36.000	Rp15.000
2.16 JAWA TIMUR	Orang/Kali	Rp44.000	Rp23.000
2.17 BALI	Orang/Kali	Rp48.000	Rp20.000
2.18 NUSA TENGGARA BARAT	Orang/Kali	Rp41.000	Rp17.000
2.19 NUSA TENGGARA TIMUR	Orang/Kali	Rp41.000	Rp21.000
2.20 KALIMANTAN BARAT	Orang/Kali	Rp44.000	Rp16.000
2.21 KALIMANTAN TENGAH	Orang/Kali	Rp40.000	Rp15.000
2.22 KALIMANTAN SELATAN	Orang/Kali	Rp45.000	Rp16.000
2.23 KALIMANTAN TIMUR	Orang/Kali	Rp43.000	Rp24.000
2.24 KALIMANTAN UTARA	Orang/Kali	Rp43.000	Rp20.000
2.25 SULAWESI UTARA	Orang/Kali	Rp55.000	Rp25.000
2.26 GORONTALO	Orang/Kali	Rp44.000	Rp14.000
2.27 SULAWESI BARAT	Orang/Kali	Rp47.000	Rp20.000
2.28 SULAWESI SELATAN	Orang/Kali	Rp48.000	Rp24.000
2.29 SULAWESI TENGAH	Orang/Kali	Rp41.000	Rp17.000
2.30 SULAWESI TENGGARA	Orang/Kali	Rp42.000	Rp20.000
2.31 MAULUKU	Orang/Kali	Rp59.000	Rp22.000
2.32 MALUKU UTARA	Orang/Kali	Rp63.000	Rp23.000
2.33 PAPUA	Orang/Kali	Rp60.000	Rp31.000
2.34 PAPUA BARAT	Orang/Kali	Rp62.000	Rp25.000

4. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN

4.1. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG ATAU BANGUNAN DALAM NEGERI

Satuan biaya pemeliharaan Gedung atau bangunan dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan rutin gedung atau bangunan di dalam negeri, guna menjaga atau mempertahankan gedung dan bangunan di dalam negeri, guna menjaga atau mempertahankan gedung dan bangunan kantor agar tetap dalam kondisi semula, atau perbaikan dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan 2% (dua persen) dari nilai bangunan saat ini, tidak termasuk untuk pemeliharaan gedung atau bangunan di dalam negeri yang memiliki spesifikasi khusus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Biaya pemeliharaan gedung atau bangunan meliputi pemeliharaan gedung, atau bangunan bertingkat, pemeliharaan gedung, atau bangunan tidak bertingkat, dan pemeliharaan halaman kantor.

Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri dialokasikan untuk:

- a. Gedung atau bangunan milik daerah; dan/atau

- b. Gedung atau bangunan milik pihak lain yang disewa dan/atau dipinjam oleh pengguna barang dan dalam perjanjian diatur tentang adanya kewajiban bagi pengguna barang untuk melakukan pemeliharaan.

Satuan biaya Pemeliharaan Gedung atam Bangunan Dalam Negeri terinci pada table 2.7.

TABEL 2.7
SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG ATAU BANGUNAN
DALAM NEGERI

NO	PROVINSI	SATUAN	GEDUNG BERTINGKAT	GEDUNG TIDAK BERTINGKAT	HALAMAN GEDUNG/ BANGUNAN KANTOR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	ACEH	m ² /tahun	Rp192.000	Rp148.000	Rp10.000
2	SUMATERA UTARA	m ² /tahun	Rp229.000	Rp171.000	Rp12.000
3	RIAU	m ² /tahun	Rp217.000	Rp162.000	Rp11.000
4	KEPULAUAN RIAU	m ² /tahun	Rp244.000	Rp182.000	Rp13.000
5	JAMBI	m ² /tahun	Rp204.000	Rp151.000	Rp11.000
6	SUMATERA BARAT	m ² /tahun	Rp182.000	Rp124.000	Rp10.000
7	SUMATERA SELATAN	m ² /tahun	Rp218.000	Rp147.000	Rp11.000
8	LAMPUNG	m ² /tahun	Rp214.000	Rp135.000	Rp11.000
9	BENGGKULU	m ² /tahun	Rp191.000	Rp128.000	Rp10.000
10	BANGKA BELITUNG	m ² /tahun	Rp215.000	Rp136.000	Rp11.000
11	BANTEN	m ² /tahun	Rp202.000	Rp144.000	Rp11.000
12	JAWA BARAT	m ² /tahun	Rp178.000	Rp102.000	Rp10.000
13	D.K.I JAKARTA	m ² /tahun	Rp206.000	Rp153.000	Rp11.000
14	JAWA TENGAH	m ² /tahun	Rp173.000	Rp97.000	Rp10.000
15	D.I. YOGYAKARTA	m ² /tahun	Rp268.000	Rp97.000	Rp10.000
16	JAWA TIMUR	m ² /tahun	Rp196.000	Rp17.000	Rp10.000
17	BALI	m ² /tahun	Rp200.000	Rp148.000	Rp10.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	m ² /tahun	Rp223.000	Rp185.000	Rp12.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	m ² /tahun	Rp197.000	Rp129.000	Rp10.000
20	KALIMANTAN BARAT	m ² /tahun	Rp201.000	Rp136.000	Rp11.000
21	KALIMANTAN TENGAH	m ² /tahun	Rp236.000	Rp155.000	Rp12.000
22	KALIMANTAN SELATAN	m ² /tahun	Rp196.000	Rp148.000	Rp11.000
23	KALIMANTAN TIMUR	m ² /tahun	Rp242.000	Rp200.000	Rp14.000
24	KALIMANTAN UTARA	m ² /tahun	Rp242.000	Rp200.000	Rp14.000

25	SULAWESI UTARA	m ² /tahun	Rp187.000	Rp122.000	Rp10.000
26	GORONTALIO	m ² /tahun	Rp196.000	Rp138.000	Rp14.000
27	SULAWESI BARAT	m ² /tahun	Rp356.000	Rp296.000	Rp18.000
28	SULAWESI SELATAN	m ² /tahun	Rp209.000	Rp190.000	Rp11.000
29	SULAWESI TENGAH	m ² /tahun	Rp226.000	Rp168.000	Rp12.000
30	SULAWESI TENGGARA	m ² /tahun	Rp197.000	Rp144.000	Rp10.000
31	MALUKU	m ² /tahun	Rp223.000	Rp197.000	Rp14.000
32	MALUKU UTARA	m ² /tahun	Rp229.000	Rp153.000	Rp14.000
33	PAPUA	m ² /tahun	Rp487.000	Rp277.000	Rp25.000
34	PAPUA BARAT	m ² /tahun	Rp632.000	Rp469.000	Rp32.000

4.2 SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS

Satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas, yang digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya.

Satuan biaya tersebut sudah termasuk biaya bahan bakar, yang besarnya sesuai dengan ketentuan perataruan perundang-undangan.

Penerapan satuan biaya pemeliharaan operasional kendaraan dinas memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

Satuan biaya ini tidak diperuntukan bagi:

- 1) Kendaraan yang rusak berat yang memerlukan biaya pemeliharaan besar dan untuk selanjutnya harus dihapuskan dari daftar inventaris; dan/atau
- 2) Pemeliharaan kendaraan yang bersifat rekondisi dan/atau *overhaul*.

Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas terinci pada Tabel 2.8, Tabel 2.9, dan Tabel 2.10.

TABEL 2.8
SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS PEJABAT

NO	PROVINSI	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
I	KEPALA DAERAH/KETUA DPRD	Unit/Tahun	Rp41.900.000
II	ANGGOTA DPRD	Unit/Tahun	Rp41.000.000
III	PEJABAT ESELON I	Unit/Tahun	Rp40.000.000
IV	PEJABAT ESELON II		
1	ACEH	Unit/Tahun	Rp39.850.000
2	SUMATERA UTARA	Unit/Tahun	Rp38.420.000
3	RIAU	Unit/Tahun	Rp38.530.000
4	KEPULAUAN RIAU	Unit/Tahun	Rp38.280.000

5	JAMBI	Unit/Tahun	Rp39.240.000
6	SUMATERA BARAT	Unit/Tahun	Rp39.190.000
7	SUMATERA SELATAN	Unit/Tahun	Rp38.550.000
8	LAMPUNG	Unit/Tahun	Rp38.670.000
9	BENGKULU	Unit/Tahun	Rp38.580.000
10	BANGKA BELITUNG	Unit/Tahun	Rp38.250.000
11	BANTEN	Unit/Tahun	Rp38.410.000
12	JAWA BARAT	Unit/Tahun	Rp38.330.000
13	D.K.I JAKARTA	Unit/Tahun	Rp38.730.000
14	JAWA TENGAH	Unit/Tahun	Rp39.950.000
15	D.I. YOGYAKARTA	Unit/Tahun	Rp39.950.000
16	JAWA TIMUR	Unit/Tahun	Rp38.610.000
17	BALI	Unit/Tahun	Rp39.950.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	Unit/Tahun	Rp39.100.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	Unit/Tahun	Rp37.980.000
20	KALIMANTAN BARAT	Unit/Tahun	Rp38.750.000
21	KALIMANTAN TENGAH	Unit/Tahun	Rp38.990.000
22	KALIMANTAN SELATAN	Unit/Tahun	Rp38.990.000
23	KALIMANTAN TIMUR	Unit/Tahun	Rp38.560.000
24	KALIMANTAN UTARA	Unit/Tahun	Rp38.560.000
25	SULAWESI UTARA	Unit/Tahun	Rp38.480.000
26	GORONTALIO	Unit/Tahun	Rp38.150.000
27	SULAWESI BARAT	Unit/Tahun	Rp37.180.000
28	SULAWESI SELATAN	Unit/Tahun	Rp38.630.000
29	SULAWESI TENGAH	Unit/Tahun	Rp39.050.000
30	SULAWESI TENGGARA	Unit/Tahun	Rp39.540.000
31	MALUKU	Unit/Tahun	Rp39.140.000
32	MALUKU UTARA	Unit/Tahun	Rp38.230.000
33	PAPUA	Unit/Tahun	Rp38.770.000
34	PAPUA BARAT	Unit/Tahun	Rp38.840.000

TABEL 2.9
SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL

NO	PROVINSI	SATUAN	RODA EMPAT	DOUBEL GARDAN	RODA DUA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	ACEH	Unit/Tahun	Rp34.620.000	Rp37.640.000	Rp3.930.000
2	SUMATERA UTARA	Unit/Tahun	Rp33.470.000	Rp36.070.000	Rp3.700.000
3	RIAU	Unit/Tahun	Rp33.560.000	Rp36.210.000	Rp3.670.000
4	KEPULAUAN RIAU	Unit/Tahun	Rp33.350.000	Rp35.930.000	Rp3.570.000
5	JAMBI	Unit/Tahun	Rp34.130.000	Rp36.970.000	Rp3.810.000
6	SUMATERA BARAT	Unit/Tahun	Rp34.100.000	Rp36.930.000	Rp3.850.000
7	SUMATERA SELATAN	Unit/Tahun	Rp33.580.000	Rp36.200.000	Rp3.670.000
8	LAMPUNG	Unit/Tahun	Rp33.670.000	Rp36.330.000	Rp3.700.000
9	BENGKULU	Unit/Tahun	Rp33.600.000	Rp36.230.000	Rp3.680.000
10	BANGKA BELITUNG	Unit/Tahun	Rp33.330.000	Rp35.860.000	Rp3.610.000

11	BANTEN	Unit/Tahun	Rp33.410.000	Rp36.090.000	Rp3.580.000
12	JAWA BARAT	Unit/Tahun	Rp33.350.000	Rp35.990.000	Rp3.560.000
13	D.K.I JAKARTA	Unit/Tahun	Rp33.650.000	Rp36.450.000	Rp3.640.000
14	JAWA TENGAH	Unit/Tahun	Rp34.880.000	Rp38.050.000	Rp3.950.000
15	D.I. YOGYAKARTA	Unit/Tahun	Rp34.680.000	Rp37.780.000	Rp3.910.000
16	JAWA TIMUR	Unit/Tahun	Rp33.600.000	Rp36.280.000	Rp3.650.000
17	BALI	Unit/Tahun	Rp35.210.000	Rp38.400.000	Rp4.110.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	Unit/Tahun	Rp34.060.000	Rp36.810.000	Rp3.810.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	Unit/Tahun	Rp33.140.000	Rp35.550.000	Rp3.580.000
20	KALIMANTAN BARAT	Unit/Tahun	Rp34.160.000	Rp36.360.000	Rp3.760.000
21	KALIMANTAN TENGAH	Unit/Tahun	Rp35.710.000	Rp38.290.000	Rp4.150.000
22	KALIMANTAN SELATAN	Unit/Tahun	Rp34.380.000	Rp36.620.000	Rp3.800.000
23	KALIMANTAN TIMUR	Unit/Tahun	Rp34.010.000	Rp36.130.000	Rp3.700.000
24	KALIMANTAN UTARA	Unit/Tahun	Rp33.660.000	Rp35.680.000	Rp3.620.000
25	SULAWESI UTARA	Unit/Tahun	Rp33.930.000	Rp36.060.000	Rp3.700.000
26	GORONTALIO	Unit/Tahun	Rp33.670.000	Rp35.690.000	Rp3.670.000
27	SULAWESI BARAT	Unit/Tahun	Rp32.470.000	Rp34.690.000	Rp3.360.000
28	SULAWESI SELATAN	Unit/Tahun	Rp33.630.000	Rp36.320.000	Rp3.640.000
29	SULAWESI TENGAH	Unit/Tahun	Rp34.450.000	Rp36.660.000	Rp3.840.000
30	SULAWESI TENGGARA	Unit/Tahun	Rp34.880.000	Rp37.210.000	Rp3.940.000
31	MALUKU	Unit/Tahun	Rp34.560.000	Rp36.730.000	Rp3.940.000
32	MALUKU UTARA	Unit/Tahun	Rp33.750.000	Rp35.740.000	Rp3.760.000
33	PAPUA	Unit/Tahun	Rp34.260.000	Rp36.310.000	Rp4.000.000
34	PAPUA BARAT	Unit/Tahun	Rp34.300.000	Rp36.390.000	Rp3.920.000

TABEL 2.10
SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN OPERASIONAL
DALAM LINGKUNGAN KANTOR, RODA 6, DAN *SPEED BOAT*

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Operasional dalam Lingkungan Kantor	Unit/Tahun	Rp9.750.000
2	Roda 6	Unit/Tahun	Rp37.110.000
3	Speed boat	Unit/Tahun	Rp20.240.000

4.3 SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR

Satuan biaya pemeliharaan sarana kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk mempertahankan barang inventaris kantor (yang digunakan langsung oleh pegawai, khususnya meja dan kursi), personal computer/*notebook*, printer, AC split, dan *genset* agar berada dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik). Biaya pemeliharaan *genset* belum termasuk kebutuhan bahan bakar minyak. Biaya Pemeliharaan printer belum termasuk kebutuhan penggantian *toner*.

Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor terinci pada Tabel 2.11

TABEL 2.11
SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARAN KANTOR

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Inventaris Kantor	Pegawai/Tahun	Rp80.000
2	<i>Personal Computer / Notebook</i>	Unit/Tahun	Rp730.000
3	<i>Printer</i>	Unit/Tahun	Rp690.000
4	<i>AC Split</i>	Unit/Tahun	Rp610.000
5	<i>Genset Lebih Kecil dari 50 KVA</i>	Unit/Tahun	Rp7.190.000
6	<i>Genset 75 KVA</i>	Unit/Tahun	Rp8.640.000
7	<i>Genset 100 KVA</i>	Unit/Tahun	Rp10.150.000
8	<i>Genset 125 KVA</i>	Unit/Tahun	Rp10.780.000
9	<i>Genset 150 KVA</i>	Unit/Tahun	Rp13.260.000
10	<i>Genset 175 KVA</i>	Unit/Tahun	Rp14.810.000
11	<i>Genset 200 KVA</i>	Unit/Tahun	Rp15.850.000
12	<i>Genset 250 KVA</i>	Unit/Tahun	Rp16.790.000
13	<i>Genset 275 KVA</i>	Unit/Tahun	Rp17.760.000
14	<i>Genset 300 KVA</i>	Unit/Tahun	Rp20.960.000
15	<i>Genset 350 KVA</i>	Unit/Tahun	Rp22.960.000
16	<i>Genset 450 KVA</i>	Unit/Tahun	Rp25.620.000
17	<i>Genset 500 KVA</i>	Unit/Tahun	Rp31.770.000

5. SATUAN BIAYA SEWA KENDARAAN DAN PERALATAN UNTUK KEPERLUAN DINAS

Satuan biaya sewa kendaraan dinas diperuntukan, dipergunakan untuk PD yang tidak memiliki/kekurangan kendaraan, sedangkan dalam pelaksanaan kegiatannya sangat memerlukan kendaraan, dapat melakukan sewa kendaraan dimaksud untuk mendukung pelaksanaan program/kegiatannya. Lamanya masa swa kendaraan dipcrhitungkan paling lama untuk 3 (tiga) hari sewa. Harga sewa kendaraan sudah termasuk BBM, Pengemudi, dan Pembantu Pengemudi.

Sedangkan anggaran sewa alat berat, diperuntukan untuk belanja sewa alat berat berupa eskavator, bulldoser, peralatan bongkar muat, sewa poton/tongkang kecil, yang dianggarkan berdasarkan standar harga satuan yang berlaku didasarkan asas kepatutan dan kewajaran, dan anggaran sewa perlengkapan dan peralatan kantor, diperuntukan untuk belanja sewa meja kursi, komputer dan printer, proyektor, generator,

tenda, pakaian adat/tradisional yang dianggarkan berdasarkan standar harga satuan yang berlaku didasarkan asas kepatutan dan kewajaran.

Satuan Biaya Sewa Kendaraan dan Peralatan untuk Keperluan Dinas terinci pada Tabel 2.12

TABEL 2.12
SATUAN BIAYA SEWA KENDARAAN DAN PERALATAN

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	Unit/Hari	Rp750.000
2	Sewa Kendaraan untuk Keperluan Dinas		
	- Pejabat Negara/Tamu Kehormatan	Unit/Hari	Rp3.500.000
	- Pejabat Eselon I dan II	Unit/Hari	Rp2.500.000
	- Bus VVIP	Unit/Hari	Rp3.750.000
	- Bus	Unit/Hari	Rp2.250.000
	- Micro Bus	Unit/Hari	Rp1.750.000
	- Pic Up	Unit/Hari	Rp750.000
	- Truck	Unit/Hari	Rp1.500.000
	- Mini Bus	Unit/Hari	Rp750.000
3	Sewa Alat Berat		
	- Ekskavator Standar Pc 200	Jam	Rp750.000
	- kskavator Long Arm Pc 200	Jam	Rp850.000
	- Ekskavator Amphibi	Jam	Rp1.600.000
	- Ponton	Jam	Rp400.000
4	Sewa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
	- Kursi	Buah	Rp5.000
	- Meja Besar/ Prasmanan	Buah	Rp75.000
	- Meja Standar	Buah	Rp30.000
	- Tenda Kecil	Buah	Rp1.500.000
	- Tenda Besar	Buah	Rp3.500.000
	- Benset	Buah	Rp10.000.000
	- Pakaian Adat/ Tradisional	Set	Rp1.500.000

6. SATUAN BIAYA PENGADAAN PAKAIN DINAS

Penganggaran pakaian dinas dan atributnya diperuntukan untuk belanja Pakaian Sipil Harian (PSH), Pakaian Sipil Lengkap (PSL), Pakaian Dinas Harian (PDH), Pakaian Dinas Upacara (PDU) yang dianggarkan berdasarkan standar harga satuan yang berlaku didasarkan asas kepatutan dan kewajaran, serta untuk penganggaran pakaian dinas tersebut harus terlebih dahulu mendapat persetujuan Sekretaris Daerah selaku Koordinator TAPD.

Penganggaran pakaian kerja diperuntukan untuk belanja pakaian kerja lapangan yang dianggarkan berdasarkan standar harga satuan yang berlaku didasarkan asas kepatutan dan kewajaran, dan untuk anggaran pakaian dinas satpam, penjaga malam, petugas kebersihan, petugas/tukang kebun.

Penganggaran pakaian khusus dan hari-hari tertentu diperuntukan untuk belanja pakaian korpri, adat daerah, batik tradisional, olah raga dan yang dianggarkan berdasarkan standar harga satuan yang berlaku didasarkan asas kepatutan dan kewajaran yang dianggarkan sesuai kebutuhan dan tidak dianggarkan secara terus menerus.

Satuan Biaya Pengadaan Pakaian Dinas terinci pada Tabel 2.13

TABEL 2.13
SATUAN BIAYA PENGADAAN PAKAIAN DINAS

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pakaian Dinas Lapangan	Buah	Rp750.000
2	Pakaian Olah Raga	Buah	Rp300.000
3	Pakaian Korpri	Buah	Rp300.000
4	Pakaian Dinas Dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	Meter	Rp1.500.000
5	Pakaian Sipil Resmi (PSR)	Stel	Rp5.000.000
6	Pakaian Sipil Harian (PSH)	Stel	Rp4.000.000
7	Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	Stel	Rp6.000.000
8	Pakaian Dinas Harian (PDH) Anggota DPRD	Stel	Rp4.000.000
9	Pakaian Dinas Harian (PDH) ASN	Stel	Rp750.000

7. SATUAN BIAYA BAHAN BAKAR MINYAK

Kendaraan yang khusus dipergunakan oleh Pejabat (Kendaraan Dinas) dan Kendaraan untuk pelaksanaan kegiatan (kendaraan operasional) dengan mencantumkan nomor polisi kendaraan dimaksud dengan alokasi anggaran untuk kendaraan yang tercatat dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) dan dianggarkan pada kegiatan penyediaan bahan logistik.

Penganggaran belanja bahan bakar minyak disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi PD.

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

SAHBIRIN NOOR